

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Terdapat banyak definisi pemberdayaan ekonomi di banyak literatur yang dikemukakan oleh para ahli. Dari segi kebahasaan, pemberdayaan merupakan terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Oxford English Dictionary, kata *empower* memiliki dua arti, yaitu: (1) *to give power atau authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau pemberdayaan.¹⁰

Sedangkan dari segi istilah (terminologi), banyak ahli yang menawarkan definisi pemberdayaan. Variasi definisi mengenai pemberdayaan bisa dijumpai di banyak literatur. Beberapa ahli memakai langsung memakai frase “pemberdayaan ekonomi” ketika menerangkan hal ini. Beberapa paragraf berikut adalah tokoh dan definisi pemberdayaan ekonomi yang dinyatakannya. Hutomo menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi,

¹⁰Albert Sydney Hornby, Anthony P. Cowie, and J. Windsor Lewis, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (Tt: Paperback, 1974), p. 282.

pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan dengan multiaspek, baik dari masyarakat sendiri, maupun aspek kebijakannya.¹¹ Definisi di atas banyak dipakai oleh kalangan penyelenggara pemerintah.

1. Pemberdayaan dan Ekonomi

Sumodiningrat menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan perekonomian yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.¹² Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian masyarakat baik secara langsung (misalnya: pemberian modal usaha, pendidikan ketrampilan ekonomi, pemberian dana konsumsi), maupun secara tidak langsung (misalnya: pendidikan ketrampilan ekonomi, perlindungan dan dukungan terhadap kaum dengan kondisi ekonomi lemah, dan lain-lain).

Beberapa literatur menyebutkan bahwa konsep pemberdayaan lahir sejak revolusi industri atau ada juga yang menyebutkan bahwa konsep pemberdayaan ada sejak lahirnya Eropa modern pada abad

¹¹Mardi Yatmo Hutomo, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoretik dan Implementasi", dalam *Makalah Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat* yang diselenggarakan Bappenas, tanggal 06 Maret 2000 di Jakarta.

¹²Mohammad Nadzir, "Membangun Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren" dalam *Jurnal Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 6. No. 1 (2015): hal. 40

18 atau renaissance, ketika banyak pihak mulai mempertanyakan determinasi gereja. Jika kemunculan ide pemberdayaan dipahami sebagai upaya untuk keluar atau melawan determinisme gereja serta monarki, maka pendapat yang menyatakan bahwa gerakan pemberdayaan mulai muncul pada abad pertengahan barang kali benar.

Di Eropa, wacana pemberdayaan muncul ketika industrialisasi menciptakan masyarakat penguasa faktor produksi dan masyarakat pekerja yang dikuasai. Pada saat itu, Karl Marx mendefinisikan pemberdayaan sebagai perjuangan kaum *powerless* untuk memperoleh surplus value sebagai hak normatif yang harus diterima masyarakat pekerja. Perjuangan untuk mendapatkan surplus value tersebut dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi. Perjuangan untuk mendistribusikan faktor-faktor produksi tersebut harus dilakukan melalui perjuangan politik.¹³

Di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan yang dilaksanakan pemerintah menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumber daya alam, dan alienasi masyarakat dari faktor-faktor produksi oleh penguasa. Penguasa memiliki akses yang lebih besar untuk menguasai kegiatan-kegiatan ekonomi yang akhirnya mempengaruhi banyak pihak dalam masyarakat. Hal-hal diatas

¹³*Ibid.*, hal. 3

akhirnya memunculkan dikotomi, yang membedakan antara masyarakat yang berkuasa dan masyarakat yang dikuasai.

Untuk membebaskan masyarakat dari situasi ini, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*). Ini adalah alasan awal mengapa pemberdayaan dinilai penting untuk dilakukan. Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata “*power*” yang berarti “kekuasaan” atau “keberdayaan”. Karenanya ide pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan yang dimiliki pihak pertama untuk membuat pihak ke-dua melakukan apa yang diinginkan pihak pertama, terlepas dari keinginan dan minat pihak ke-dua.¹⁴

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan untuk: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan kelompok lemah/rentan untuk meningkatkan pendapatannya, dan memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan; dan (c) berpartisipasi dalam

¹⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama. 2005), hal. 57

pembangunan dan proses pengambilan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kelompok lemah/rentan.¹⁵

Para ahli mengemukakan bahwa bahasan mengenai pemberdayaan hendaknya ditinjau dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan yang dilakukan yang meliputi.¹⁶

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan pihak-pihak yang lemah atau kurang beruntung.
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses yang dengannya suatu pihak akan menjadi kuat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memperbaiki keadaan.
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur ekonomi yang ada di tengah masyarakat.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara agar masyarakat, organisasi, dan komunitas mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi adalah proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan ekonomi adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah (kondisi ekonominya) dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada

¹⁵*Ibid.*, hal. 58

¹⁶*Ibid.*, hal. 58-59

keadaan atau hasil yang ingin dicapai, dan konsep mengenai tujuan pemberdayaan ini sering kali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Bila konsep pemberdayaan di atas dilekatkan mendahului konsep ekonomi, maka didapati konsep baru yang lebih sempit dan spesifik. Pemberdayaan ekonomi merupakan kegiatan memberi kekuasaan pada pihak ke-dua (sasaran pemberdayaan) agar menjadi mampu dalam bidangekonomi.

Konsep pemberdayaan ekonomi lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada masyarakat mayoritas (yang bukan pemegang kekuasaan ekonomi). Konsep ini dibangun dari kerangka logika sebagaiberikut:

- 1) bahwa pemusatan kekuasaan terbangun dari pusat penguatan faktorproduksi;
- 2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat penguasapinggiran;
- 3) kekuasaan akan menghasilkan bangunan atas sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi,dan
- 4) kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok

masyarakat, yaitu: masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.¹⁷

2 Optimalisasi

Optimal memiliki arti kata terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, atau perbuatan, sehingga optimalisasi juga dapat di artikan sebagai suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu keputusan atau desain menjadi sempurna, fungsional dan efektif.¹⁸

Optimal adalah kondisi tertinggi yang mungkin untuk di lakukan seseorang/sesuatu tanpa merusak unsur yang ada padanya. Kata optimal di pakai tanpa harus sampai mencapai batas akhir, melainkan batas akhir yang tertinggi atau terbaik.

Menurut machfud Sidik optimalisasi adalah suatu tindakan atau kegiatan yang berhubungan dengan suatu peningkatan atau pengoptimalan. Untuk itu di perlukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap subjek maupun objeknya.¹⁹

¹⁷Prajono, O.S dan Pranarka, A.M.W, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta: Penerbit CSIS. 1996), hal. 269

¹⁸*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 800

¹⁹Artikel Machfud Sidiq, “*Optimalisasi Pajak Daerah Dan retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*”, 2001, hal.8

3. Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit adalah 10%, yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.²⁰

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Bab I Pasal 1 mengenai ketentuan umum Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.²¹

4. Pembangunan

Pembangunan adalah upaya untuk membuat kehidupan yang lebih baik untuk setiap orang.²² Secara umum kita dapat mengartikan pembangunan sebagai suatu proses perencanaan yang di lakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat

²⁰Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat (1), hal 29.

²¹Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (2), hal2.

²²Peet Richard dan harttwick Elaine, "*Theories of Development contentations, argumentation, alternatives*", (Guiliford Press :2009).

suatu perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurut susanto pembangunan secara umum identik dengan proses perubahan yang di rencanakan atau perbaikan kondisi menuju arah yang lebih baik. Pembangunan adalah sebuah upaya mencapai kemajuan bagi umat manusia.²³

Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Parnsos mengemukakan pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan dan memperngaruhi terhadap kejadian-kejadian yang mempu mempengaruhi suatu kehidupan. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.²⁴

²³Astrid dan Susanto, "Sosiologi Pembangunan", (Bandung : PT. BinaCipta), hal.3

²⁴Edi Suharto, "*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*", (Refika aditama: Bandung, 2014), hal 58-59.

Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat adalah suatu yang sangat penting sehingga pemberdayaan dalam sudut pandang islam telah memiliki paradigm yang holistik dan strategis.²⁵ Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat luas agar dapat mandiri dalam melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan masyarakat dan keselamatan dunia dan diakhirat.

Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam islam perlunya diterapkan, karena dengan adanya pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan suatu pembangunan yang berkelanjutan. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik.

Dalam agama Islam memiliki konsep pemberdayaan masyarakat dalam kitab suci yaitu Al-Qur'an Q.S Ar-Ra'd ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّن أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
 لَأُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا
 فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِّن وَّالٍ

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.¹ menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.²⁶

¹ Departemen Agama RI, "Alqur'an dan Terjemahan", (Bandung: CV Diponegoro, 2010) 13:11.

Berdasarkan ayat Ar-Ra'd ayat 11 yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak mau merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif kemampuan untuk mengelola dan memberntuk panggilan kemampuan pribadi, kreatifitasm kompetensi, dan daya piker yang dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang telahdimiliki.

5. Ekonomi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indoneisa, ekonomi adalah suatu aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Secara umum ekonomi merupakan suatu aturan rumah tangga atau manajemen dalam rumah tangga.²⁷

Ekonomi juga bisa diartikan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya.

²⁶Departemen Agama RI, "*Alqur'an dan Terjemahan*", (Bandung: CV Diponegoro, 2010) 13:11.

²⁷Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Balai pustaka, 2001), hal. 854

Ekonomi adalah suatu aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Secara umum ekonomi merupakan suatu aturan rumah tangga atau manajemen dalam rumah tangga.

Sedangkan Ekonomi Islam menurut Al-Qur'an Surat Saba 34:24

Berbunyi :

﴿فَلَمَّ يَرُزُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَلِلَّهِ أَتَاوَا يَا كُمْلَعَالَى هُدًى وَفِيضًا لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

Artinya: "katakanlah: "siapakah yang member rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?", katakanlah : "Allah", dan sesungguhnya kami tahu kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata." (QS Saba : 24).²⁸

Dari ayat di atas telah Allah jelaskan bahwa sesungguhnya rezeki yang manusia nikmati adalah limpahan nikmat dari Allah SWT. Allah memberikannya dari langit dan bumi. Sesungguhnya kemakmuran ekonomi manusia di muka bumi tidak akan pernah terjadi jika tanpa adanya bantuan dan ketetapan dari Allah SWT.

6. Masyarakat

Masyarakat menurut Selo Sumarjan adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.²⁹ Secara umum masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap mempunyai kepentingan yang sama. Masyarakat juga merupakan salah satu satuan sosial sistem

²⁸Departemen Agama RI, "Alqur'an dan Terjemahannya penyempurnaan ke tiga", (Jakarta: Lentera Abadi, 2016). 34:24

²⁹Prof. Dr. Selo Sumarjan, "Masyarakat dan Kebudayaan", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981), hal 22.

sosial, atau kesatuan hidup manusia. Kata masyarakat sendiri berasal dari bahasa Arab Syakara yang artinya ikut serta atau partisipasi, kata Syakara berarti slaing bergaul yang istilah ilmiahnya berinteraksi.

Sarjiyanto melakukan penelitian tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan metode grounded theory, dimana pendekatan yang dilakukan dengan terjun langsung di lapangan untuk melakukan pengamatan. Instrumen pengamatan di lapangan melalui in-depth interview dengan daftar pertanyaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas peran KUBE dalam upaya peningkatan kesejahteraan sentra industri mebel sangat tinggi, hal ini dilihat dari indikator kesejahteraan ekonomi masyarakat anggota KUBE yang meningkat dan adanya kepemilikan asset/ investasi untuk modal reproduksikembali.³⁰

Menurut teori keberhasilan dalam mengakumulasi asset dan melakukan reinvestment oleh KUBE merupakan ciri atau bentuk dari social entrepreneurship. Efektifitas peran KUBE juga ditunjukkan adanya peningkatan produktifitas masyarakat anggota KUBE. Hal ini sejalan dengan teori Input-Process-Output Model Strategic Entrepreneurship, bahwa KUBE berhasil melakukan orcestrasi input-proses dan oupu tuntuk menghasilkan keuntungan

³⁰Sarjiyanto, "Peran Kelompok Masyarakat (KUBE Lumbung Sinergi) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga Desa Bulakan Sukoharjo Jawa Tengah" dalam *Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa* 27.2 (2018): hal. 88.

bagi personal anggota, kelembagaan kelompok sendiri dan lingkungan sosial masyarakat sekitar.³¹

Sedangkan hambatan yang dihadapi KUBE dalam upaya peningkatan kesejahteraan sentra industri mebel adalah; bersifat internal dan eksternal. Kendala internal adalah masih rendahnya kreasi dan inovasi anggota karena latarbelakang formal pendidikan yang rendah, disamping itu transparansi juga menjadi sumber kendala internal KUBE. Kendala eksternal adalah adanya stereotype negatif terhadap KUBE dan adanya postpower syndrome tokoh masyarakat yang senior.³²

Teori Input-Process-Output Model Strategic Entrepreneurship yang dimaksudkan dalam keterangan di atas yakni Konstruk Strategic Entrepreneurship (SE) yang menunjukkan hubungan input yang berupa lingkungan, organisasi/ kelembagaan dan kemampuan personal dan proses pencapaian tujuan melalui sinergitas sumberdaya input untuk menghasilkan output yang berupa penciptaan nilai kepada konsumen dan peningkatan daya saing, serta penciptaan kemakmuran dan keuntungan lainnya bagi sosial, organisasi/ kelembagaan dan keuntungan personal individu. Model Strategic Entrepreneurship (SE) disebut dengan Input Proses-Output Model SE. Dengan model Strategi Entrepreneurship tersebut, dapat diketahui bahwa efektivitas peran KUBELambung

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

Sinergi dapat meningkatkan produktivitas karena dalam prosesnya terjadi orkestrasi sumber daya sehingga dapat menghasilkan output yang memiliki keunggulan kompetitif serta akan menghasilkan keuntungan bagi lingkungan sosial sekitar, organisasi/ kelembagaan kelompok masyarakat dan anggota KUBE Lumbung Sinergi.³³

7. Desa

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Desa adalah kesatuan wilayah yang di huni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (di kepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Kata Desa sendiri berasal dari kata Sansakerta yakni “dhesi” yang artinya tempat lahir. Menurut Sutardjo Kartodikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Sedangkan menurut Saniyanti Nurmuharimah, desa merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Definisi desa juga ditekankan oleh hukum melalui Undang-Undang No.5 Tahun 1979 yang menjelaskan bahwa desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat dan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di

³³*Ibid.*

bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁴

Definisi desa menurut UU ditambahkan pada UU No.22 Tahun 1999. Dalam UU tersebut berbunyi bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Dengan demikian pemerintah desa adalah kepala desa beserta perangkat desa dan anggota BPD. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban dimaksud. Dan

³⁴K.Wanjtik Saleh, "*UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa dan UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah*", (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1989).

sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Bab IV pasal 11 pemerintah desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang definisi Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena ini Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahdesa.

B. Penelitian Terdahulu

1. Afrilianto³⁵, hasil Penelitiannya yang berdasarkan hasil estimasi regresi data panel, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan di 39 kecamatan di Kab. Bogor adalah alokasi dana desa, jumlah angkatan kerja dan Dummy. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan oleh penulis mengenai Alokasi Dana Desa adalah, alokasi Dana Desa memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memperbaiki kelayakan hidup serta kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai Alokasi Dana Desa adalah, penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang memiliki subjek tentang strategi pengoptimalan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa untuk meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakat, sedangkan yang diteliti oleh Anugrah Gusti Afrilianto adalah penelitian kuantitatif dimana subjek dari penelitian ini adalah dampak dari Alokasi Dana Desa terhadap Ekonomi masyarakat.

³⁵Anugrah Gusti Afrilianto, “Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Bogor”, (Bogor:Departemen Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, 2017).

2. Azwari dan Sukanto³⁶, hasil Penelitian Penyaluran dana Desa dan Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun daerah yang telah melakukan penyaluran Alokasi Dana Desa menunjukkan peningkatan perekonomian masyarakat dari tahun 2006 sebesar 35,7% dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 90%. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang penyaluran ADD yang di gadang-gadang mampu mengentaskan kemiskinan atau perekonomian masyarakat yang masih berekonomi rendah. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang ditulis oleh Azwari dan Sukanto adalah, penulis memakai jenis penelitian kualitatif sedangkan Azwari dan Sukanto melakukan penelitian menggunakan penelitian kuantitatif.

3. Abidin³⁷, hasil penelitian adalah Kurangnya kapasitas aparat desa menjadi salah satu penghambat pengalokasian dan pelaporan dana Alokasi Dana Desa secara baik, sehingga hal ini menjadi salah satu pemicu program kerja desa tidak berjalan dengan baik. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zainul Abidin dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah, penelitian ini

³⁶Azwari dan Sukanto, “Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan”. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 12 No. 1, Tahun 2014,

³⁷Muhammad Zainul Abidin, “Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa”, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik. Vol.6 No.1, Tahun 2015.

sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan membahas tentang kinerja pengoptimalan yang telah di lakukan oleh pihak pemerintah desa dalam mewujudkan program kerja desa secara baik. Perbedaannya adalah penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Zainul Abidin ini mengambil Keuangan Desa sebagai subjek utama di dalam penelitiannya, sedangkan penulis mengambil strategi pengoptimalan Alokasi Dana Desa yang di lakukan oleh pihak pemerintah desa dalam membangun perekonomian masyarakat sebagai objek penelitian.

4. Putra, Pratiwi, dan Suwondo³⁸, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan peruntukannya.

Persamaan penelitian yang di lakukan oleh Putra dengan penelitian yang akan di lakukan oleh penulis adalah sama-sama ingin membahas tentang Alokasi Dana Desa yang mampu memberdayakan masyarakat dan penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah penelitian yang di lakukan oleh Putra merupakan penelitian yang menggunakan data penelitian sepenuhnya dari pihak pemerintah desa, sedangkan penelitian yang kana di lakukan oleh

³⁸Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, "*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*", (Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya : Malang), Vol. 1, No. 6.

penulis adalah data penelitian yang di peroleh dari pemerintah desa dan juga hasil wawancara terhadap masyarakat desa.

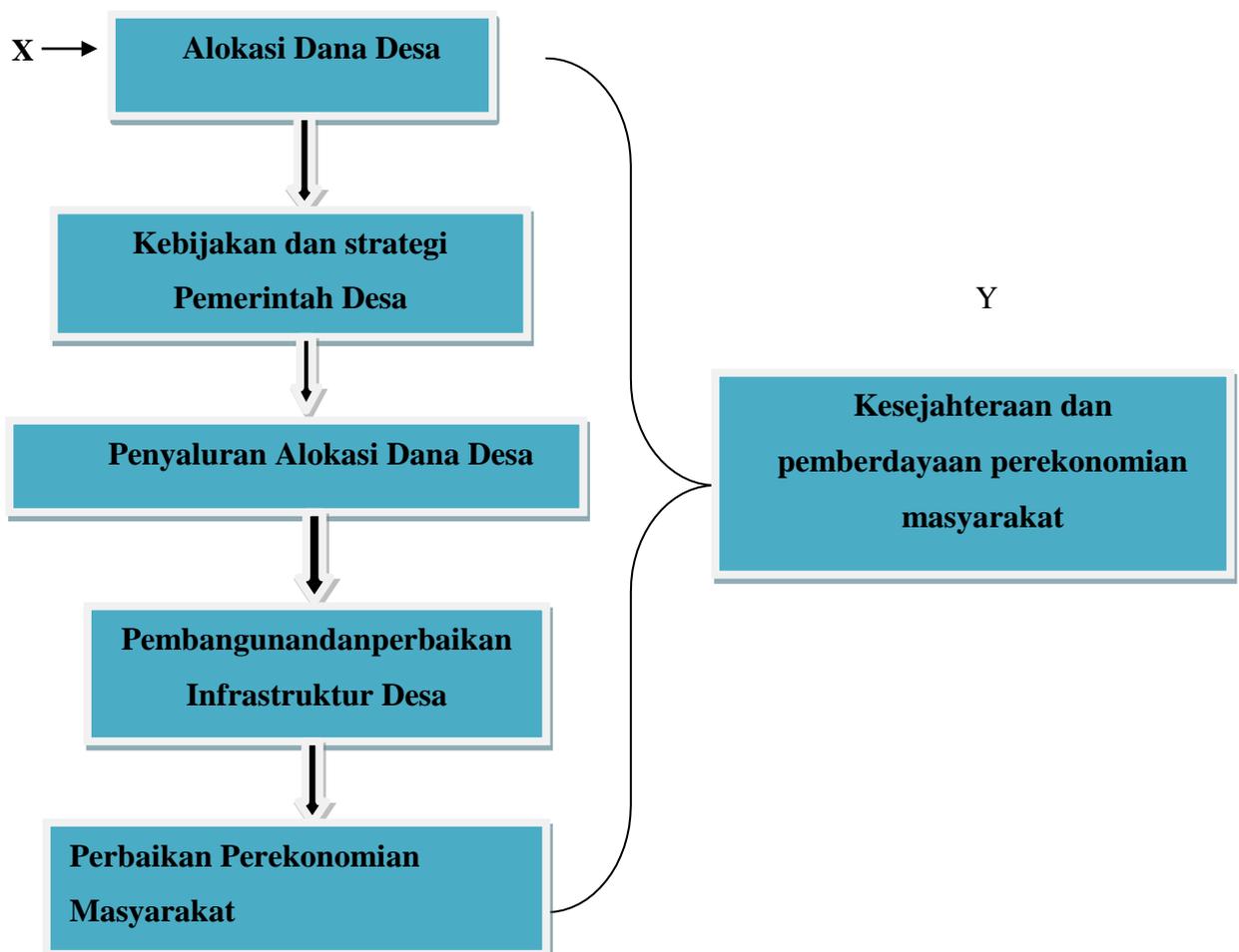
5. Faridah³⁹, hasil penelitian adalah Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, dapat diambil beberapada kesimpulan yaitu perencanaan program Alokasi Dana Desa di Desa Sidogedungbatu telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang di buktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif. Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Desa Sidogedungbatu telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel.

Persamaan penelitian yang di lakukan oleh Faridah dengan penelitian yang akan di lakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang di lakukan oleh pihak pemerintah Desa, perbedaannya adalah penelitian yang di lakukan oleh Faridah ini lebih membahas mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa, sedangkan penelitian yang akan di teliti oleh penulis membahas tentang strategi pengoptimalan Alokasi Dana Desa yang di lakukan oleh pihak pemerintah Desa.

³⁹Faridah, "*Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan belanja Desa (APBDesa)*", (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Surabaya),2015.

C. Kerangka Berpikir Teoritis

Kegiatan pengoptimalan dana desa yang dimaksudkan dalam penelitian ini pada dasarnya terdiri dari beberapa tahapan yang dimulai dari pengalokasian dana desa, kebijakan dan strategi pemerintah desa, penyaluran alokasi dana desa, pembangunan dan perbaikan infrastruktur desa, serta perbaikan perekonomian masyarakat. Tahapan-tahapan yang telah disebutkan di atas akan memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan pembangunan dan perekonomian masyarakat. Dalam hal ini peran pemerintah desa memegang posisi yang sangat vital dalam rangka pengoptimalan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Untuk lebih lengkapnya, tahapan-tahapan dari konsep tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:



Dari kerangka pikir di atas dapat di jelaskan bahwa Alokasi Dana Desa tidak akan pernah luput dari peran pemerintah Desa dalam proses Alokasinya. Dimana hal ini akan menjadi tanggung jawab pemerintah Desa dalam melakukan peengelolaan Dana Desa serta pembentukan strategi yang tepat akan membuat proses pengalokasian Dana Desa bisa menjadi lebih optimal dan tepat sasaran. Pengalokasian Dana Desa di harapkan mampu memberikan dampak positif dan dampak baik bagi masyarakat, seperti hal nya Dana Desa di alokasikan untuk pembangunan dan perbaikan pada infrastruktur Desa, sehingga masyarakat mendapatkan dan merasakan fasilitas Desa yang sesuai. Dan hal ini juga dapat memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat Desa karena infrastruktur yang memadai akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan penghasilan serta proses pemberdayaan masyarakat juga akan lebih mudah di lakukan. Sehingga strategi pengoptimalan pengalokasian Dana Desa yang tepat dapat memberikan kesejahteraan dan peningkatan perekonomian bagi masyarakat.